



Judul : Tidak Ada Kenaikan Biaya Haji bagi Jemaah
Tanggal : Kamis, 09 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

PERJALANAN IBADAH

Tidak Ada Kenaikan Biaya Haji bagi Jemaah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 tidak naik meski harga avtur dunia tengah melonjak tajam. Beban tambahan operasional akibat kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh negara melalui alokasi APBN sebesar Rp 1,77 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pilihan untuk tidak menaikkan ongkos haji merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat, khususnya jemaah dari kalangan ekonomi bawah. Pemerintah tetap konsisten pada keputusan menurunkan ongkos haji yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa membahayakan fluktuasi harga bahan bakar pesawat kepada masyarakat.

"Walaupun harga avtur naik, kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah," ujar Presiden saat rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pada 29 Oktober 2025, DPR bersama pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan rata-rata Rp 87,4 juta per anggota jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang ditanggung langsung oleh jemaah ditetapkan Rp 54,19 juta atau turun Rp 1,23 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ketetapan tersebut menghadapi tantangan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Harga avtur internasional per Rabu kemarin melejit 80,3 persen menjadi 133,8 sen AS per liter dibandingkan bulan sebelumnya.

Lonjakan serupa terjadi pada avtur domestik yang naik 72,5 persen menjadi Rp 23.551,08 per liter. Sebelum harga avtur melonjak, rata-rata biaya penerbangan per anggota jemaah sekitar Rp 33,5 juta.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja Komisi VIII DPR menjelaskan, dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per orang diperkirakan meningkat menjadi Rp 46,9 juta atau naik 39,85 persen. Adapun jika dilakukan pengalihan rute (*rerouting*) untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melonjak hingga Rp 50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.

Kenaikan harga bahan bakar, yang berkontribusi hingga 40 persen dari biaya operasional, ini mendorong dua maskapai pengangkut jemaah haji reguler, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, mengusulkan kenaikan biaya penerbangan. Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sekitar Rp 7,9 juta per orang, sementara Saudia Airlines mengusulkan kenaikan 480 dolar AS atau sekitar Rp 8 juta per orang.

"Force majeure"

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui se usai rapat kerja pemerintah menegaskan,

[Bersambung ke him 15 kol 3-5]

Tidak Ada Kenaikan Biaya Haji bagi Jemaah

(Sambungan dari halaman 1)

Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar beban akibat kondisi *force majeure* ini tidak ditanggung oleh jemaah.

Bahkan, keputusan awal untuk menurunkan ongkos haji hingga Rp 2 juta harus tetap dipertahankan. "Perintah Presiden, ongkos haji harus tetap turun Rp 2 juta. Jadi, tidak ada kenaikan. Justru Presiden memutuskan kenaikan-kenaikan (biaya avtur) itu akan ditanggung oleh APBN. Kami juga akan bicara dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) terkait pengelolaan keuangan haji," katanya.

Dahnil menambahkan, total dana yang harus ditanggung negara mencapai Rp 1,77 triliun. Pemerintah akan terus memantau situasi global, termasuk menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi, untuk melakukan perhitungan ulang. "Negara ambil alih beban tersebut melalui dana efisiensi dari APBN, maka jemaah tidak perlu membayar beban kenaikan tersebut," lanjutnya.

Mengenai mekanisme penyaluran dana tersebut dari APBN ke maskapai, Dahnil belum bisa memberikan kepastian. "Nanti akan dibicarakan lebih rinci," ucapnya.

Di sisi lain, guna menekan biaya di masa depan, Presiden Prabowo menginstruksikan

pembentukan *joint venture* antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Kerja sama dengan skema 50:50 ini bertujuan menghapus praktik *ferry flight* atau penerbangan kosong yang selama ini tidak ekonomis.

"Selama ini pesawat Garuda berangkat bawa haji, pulangnyanya kosong. Ini tidak masuk akal. Dengan kerja sama ini, pesawat ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi," ucap Presiden.

Perkampungan haji

Selain itu, Indonesia kini telah memiliki lahan seluas 45 hektar di Mekkah untuk membangun Perkampungan Haji Indonesia yang terdiri atas puluhan menara akomodasi. Pemerintah juga tengah mengajukan izin kepada Kerajaan Arab Saudi untuk memiliki terminal khusus haji guna mempercepat alur masuk dan keluar jemaah Indonesia.

Masa tunggu haji pun yang sebelumnya mencapai 48 tahun kini dipangkas menjadi maksimal 26 tahun. "Saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi," pungkash Prabowo.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo dalam mengatasi kebuntuan kenaikan biaya penerbangan jemaah haji. Langkah Presiden memutuskan untuk

menalangi selisih biaya melalui APBN merupakan solusi yang tepat bagi keberlangsungan ibadah haji tahun ini. Komisi VIII DPR pun sejak awal berkeinginan agar beban tambahan ini tidak boleh ditanggung oleh jemaah.

"Jika beban tambahan sebesar Rp 8 juta per orang itu tetap dipaksakan kepada jemaah, persiapan yang saat ini sudah hampir sempurna bisa berantakan total," ujar Marwan.

Marwan mengingatkan pemerintah agar tetap mencari payung hukum yang kuat agar kebijakan ini tidak berbentangan dengan undang-undang.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/4), Menhaj Irfan Yusuf memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M telah siap. Pernyataan ini juga disampaikan dalam pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdulah Almudi saat membahas penguatan koordinasi dan kesiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah, seluruh tahapan persiapan haji Indonesia pada prinsipnya telah selesai. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama pada 21 April 2026 dan secara bertahap akan diberangkatkan ke Arab Saudi mulai 22 April 2026," ujar Menhaj. (SYA/NIA)